

Transformasi Gender Dalam Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam

Muh. Irham¹, Muh. Rizky Alamsyah², Muh. Alfaridzi Ramli³, Kurniati Kurniati⁴

¹Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 10100122072@uin-alauddin.ac.id¹

Abstract

This study aims to explore the role of women in leadership in the modern era. Using library research methods, this study analyzes various literatures that discuss the differences in leadership styles between women and men and the challenges faced by women in leadership positions. The results of this study indicate that women have unique leadership characteristics, such as abilities that can support their leadership effectiveness. However, women still face various challenges, including gender stereotypes and discrimination. This study emphasizes the importance of awareness and support for women in taking leadership roles in various fields.

Keywords : Islamic Law; Gender; Leadership

Publish Date : 30 November 2024

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Oleh sebab itu, setiap perilaku yang ada dalam dirinya akan diminta pertanggung jawaban. Jiwa kepemimpinan yang ada terkadang untuk dirinya sendiri, maka pertanggung jawaban terhadap kepemimpinannya akan tetap diminta. Ini menyatakan pentingnya kepemimpinan, lingkup kecil seperti manusia perlu perilaku kepemimpinan. Tanpa pemimpin, organisasi tidak akan berjalan lancar. Karena anggota dalam organisasi memerlukan arahan dari pemimpin.¹

Kepemimpinan merupakan suatu hal yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin organisasi. Efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh kepiawaiannya mempengaruhi dan mengarahkan para anggotanya. Pemimpin dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan juga tingkat prestasi suatu organisasi. Para pemimpin juga memainkan peranan penting dalam membantu kelompok, individu untuk mencapai tujuan. Pemimpin adalah seorang

pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu.²

Setiap tahun, perkembangan pemikiran bagi kaum laki-laki dan perempuan terus mengalami perkembangan yang signifikan, terkhususnya bagi kaum perempuan. Hal ini terlihat semakin banyaknya kaum perempuan yang ikut dalam kanca politik maupun organisasi yang dapat mewakili kaum perempuan di berbagai jenis kegiatan di masyarakat. Dalam kaitan ini telah banyak wanita yang berhasil meraih jabatan, mulai dari yang rendah sampai posisi puncak dalam suatu lembaga atau negara. Bahkan sejarah telah mencatat beberapa wanita yang jaya di panggung politik dan menduduki jabatan menteri, wakil presiden hingga presiden atau perdana menteri bahkan sudah banyak perempuan menjadi ketua pengadilan, baik tingkat kabupaten maupun pada tingkat propinsi bahkan pusat pun sudah mulai ada.

¹ Cahyaningsih, I. P. (2020). Peran kepemimpinan wanita di era modern. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan*, 5(1), 168-181.

² Fitriani, A. (2015). Gaya kepemimpinan perempuan. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(2), 1-22.

Kenyataan ini, telah memunculkan polemik di kalangan umat Islam, khususnya para ulama, dan organisasi Islam lainnya yang berkaitan dengan pandangan Islam terhadap keberadaan wanita dalam jabatan-jabatan strategis di sektor publik itu. Polemik ini berawal dari pandangan tentang perbedaan struktur biologis antara laki-laki dan wanita yang berimplikasi pada peran yang diembannya dalam masyarakat. Dari struktur anatomi biologis, wanita dianggap memiliki beberapa kelemahan yang lebih banyak dibandingkan dengan kaum laki-laki normal.³

Umumnya, organisasi dipimpin oleh seorang laki-laki, namun di zaman yang modern ini menuntut kaum wanita untuk mampu memerankan sabagai seorang pemimpin sebuah organisasi. Di mana wanita dan pria memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Seorang Laki-laki lebih menggunakan sifat keadilan dalam melakukan kepemimpinan, sedangkan perempuan lebih menggunakan ke perasaannya dalam memerankan kepemimpinan.⁴ Banyak seorang wanita yang menjadi pemimpin, seperti menjadi presiden, direktur perusahaan, pemimpin organisasi, dan lain sebagainya. dalam organisasi wanita diibaratkan seperti, dua sisi mata uang. Dalam hal lain, masih banyak pihak yang memperdebatkan peran wanita lebihnya menyudutkan posisi sebagai seorang pemimpin.⁵ Wanita berjuang seperti itu untuk merealisasikan dan memaksimalkan kapasitas, sehingga hak dan pengakuan mampu didapatkan.⁶

Relasi gender dalam kepemimpinan perempuan telah menjadi topik yang semakin mendapatkan perhatian di era

modern. Meskipun sudah banyak kemajuan dalam kesetaraan gender, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai posisi kepemimpinan yang setara dengan pria. Kepemimpinan perempuan tidak hanya penting dari perspektif kesetaraan gender, tetapi karena kemampuan mereka dalam menghasilkan keputusan inklusif dan komprehensif. Kepemimpinan perempuan juga masih menghadapi stereotip gender yang menganggap kepemimpinan sebagai domain yang cocok untuk pria. Hal ini sering kali menghambat perempuan untuk meraih posisi kepemimpinan yang layak.⁷

Di sisi lain, era modern juga membuka banyak peluang baru bagi perempuan dalam kepemimpinan. Teknologi, globalisasi dan perubahan budaya telah membantu memperluas cakupan perempuan dalam berbagai bidang.⁸ Perempuan yang berhasil mencapai posisi kepemimpinan sering kali menjadi inspirasi bagi generasi muda dan membawa perubahan positif dalam organisasi mereka.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran perempuan dalam kepemimpinan di era modern, mengkaji tantangan yang dihadapi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan di era modern, menganalisis peluang yang dapat dilakukan perempuan dalam kepemimpinan di era modern serta bagaimana peran teknologi dan globalisasi dalam mempengaruhi relasi gender dalam kepemimpinan perempuan di era modern.

Manfaat penelitian ini adalah membantu memahami secara mendalam tentang relasi gender dalam kepemimpinan perempuan di era modern, mengetahui tantangan yang dihadapi perempuan dalam

³ Hamka, H. (2016). Kepemimpinan Perempuan dalam Era Modern. *Al-Qalam*, 19(1), 107-116.

⁴ Cahyaningsih, I. P. (2020). Peran kepemimpinan wanita di era modern. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan*, 5(1), 168-181.

⁵ Rakia, A. S. R., & Hidayat, W. A. (2022). Aspek Feminist Legal Theory dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Amsir Law Journal*, 4(1), 69-88.

⁶ Cahyaningsih, I. P. (2020). Peran kepemimpinan wanita di era modern. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan*, 5(1), 168-181.

⁷ Malihah, L., Zabidi, H., Atkia, N., Apifah, N. N., & Haryanti, P. (2024). Kepemimpinan Perempuan dan Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), 1094-1103.

⁸ Hidir, A., & Malik, R. (2024). Teori Sosiologi Modern. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

⁹ Amanda, K. S., Rahardjo, T., & Ayun, P. Q. (2024). Isu Seksisme Dan Relasi Gender Dalam Kepemimpinan Perempuan di Organisasi Mahasiswa Universitas Diponegoro. *Interaksi Online*, 12(3), 422-434.

kepemimpinan di era modern, peluang yang dapat dilakukan perempuan dalam kepemimpinan di era modern serta dapat menjadi referensi bagi peneliti dan mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Relasi Gender dalam Kepemimpinan perempuan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis. Metode ini digunakan untuk melibatkan berbagai usaha penting dalam mencari informasi data dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal dan sumber lainnya.¹⁰ Metode penelitian kepustakaan adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menyimpulkan informasi yang mencakup pengumpulan data yang telah terkumpul seperti buku, jurnal dan sumber lainnya yang relevan dengan relasi gender dalam kepemimpinan perempuan tantangan dan peluang di era modern.

Analisis dan Pembahasan Gender dan Kepemimpinan Dalam Islam

Gender adalah konsep kultural yang membedakan peran, perilaku, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Istilah ini diperkenalkan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan bawaan dan bentukan budaya antara laki-laki dan perempuan. Menurut Nasaruddin Umar, laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam Islam, di mana keduanya sama-sama sebagai hamba Allah, berperan sebagai khalifah di bumi, menerima perjanjian primordial, terlibat dalam drama kosmis (seperti Adam dan Hawa), serta memiliki potensi meraih prestasi. Dalam kapasitasnya sebagai hamba dan khalifah, laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal (bertakwa) dan bertanggung jawab atas tugas-tugas kekhilafahan mereka di bumi.

Begitu pula laki-laki dan perempuan samasama mengemban amanat dan menerima perjanjian primordial dengan Allah (QS. Al-A'raf (7): 172). Menurut Fakhru al-Razi, bahwa tak seorang pun anak manusia yang lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar tentang ekstensi Tuhan. Ini berarti, bahwa dari aspek penerimaan perjanjian primordial itu, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Semua ayat yang mengisahkan drama kosmis, yaitu cerita tentang keberadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan damir (kata ganti orang) untuk dua orang (huma) yang merujuk kepada Adam dan Hawa secara bersamaan. Penjelasan lebih rinci dikemukakan dalam QS. Al-Baqarah (2):35, al-A'raf (7): 20, 22, 23 serta al-Baqarah (2): 187.

Rasulullah saw juga bersabda:

Artinya: *Sesungguhnya perempuan itu adalah belahan (mitra) laki-laki” (HR Abu Daud dari Aisyah).*

Karena itu, pemahaman terhadap ayat dan hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan perlu diadakan reinterpretasi, termasuk fiqh. Dalam kaitan ini Amir Syarifuddin salah seorang pakar ushul fiqh di Indonesia mengatakan bahwa karena fiqh merupakan hasil pemikiran ulama mujtahid yang menurut dasarnya dapat mengalami perubahan dengan cara mengadakan reinterpretasi terhadap dalil yang menjadi sandaran bagi pemikiran tersebut.

Dengan demikian, seandainya potensi perempuan selama ini dianggap kurang berkembang yang menyebabkan kekurang berdayaannya dalam kehidupan masyarakat banyak disebabkan oleh budaya masyarakat yang mengitarinya dan bukan disebabkan oleh ajaran agama yang berdasarkan wahyu dan petunjuk Nabi dalam sunnahnya. Dalil-dalil yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam interaksi sosial bukanlah harga mati, mengingat tampilnya Siti Aisyah dalam kehidupan sosial dan politik dengan seizin Nabi dan begitu pula para sahabat Nabi belakangan tidak pula menghalanginya.

¹⁰ Juliardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

Bahkan al-Qur'an mengabadikan citra perempuan ideal yang mempunyai kemandirian politik, seperti sosok Ratu Balqis, penguasa perempuan yang mempunyai kekuasaan besar (super power), yang dikisahkan dalam QS. Al-Naml (27): 23:

إِنِّي وَجَدْتُ أُمَّرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya:

“*Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.*”

Dengan mengabadikan kisah Ratu Balqis, penguasa kerajaan Saba pada masa Nabi Sulaiman ini menunjukkan bahwa al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam sejak awal telah mengakui peran perempuan dalam posisi pimpinan publik.¹¹

Dengan kata lain, ayat ini secara tersirat mengizinkan perempuan untuk menjadi pemimpin, termasuk sebagai kepala negara. Oleh karena itu, hadis dan ayat lain yang secara zahir melarang perempuan untuk menjadi pemimpin juga harus diperiksa. Ayat tersebut di antaranya adalah QS. Al-Nisa: “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan*”.

Ayat ini harus dipahami secara komprehensif dan bukan sepotong-sepotong sebab dalam ayat ini ada kalimat lanjutannya, yakni “*karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*”, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah “kepemimpinan dalam keluarga (rumah tangga), dan itulah derajat yang diberikan kepada laki-laki.”

Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 228:

وَالْمَطْلُوقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَنْفُسِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُوْلَتِهِنَّ أَحْسَنَ بِرِّدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الذَّيْءِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹¹ Puspitawati, H. (2013). Konsep, teori dan analisis gender. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian.

Artinya: “*Dan para istri yang diceraiakan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana*”

Ayat di atas menurut Rasyid Rida merupakan kaidah umum yang berbicara tentang kedudukan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, kecuali dalam masalah kepemimpinan dalam rumah tangga.

Penempatan laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga itu sebenarnya merupakan respon terhadap kondisi sosial masyarakat Arab menjelang dan ketika al-Qur'an diturunkan. Dalam hal ini peran laki-laki mendominasi berbagai bidang kehidupan termasuk dalam sistem keluarga. Dalam masyarakat Arab, laki-laki bertugas membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga, bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Konsekuensinya, laki-laki memonopoli kepemimpinan dalam semua tingkatan.

Di samping itu ayat di atas secara tersirat menunjukkan bahwa secara kodrati, laki-laki “cenderung ingin melindungi perempuan (nature). Dengan kata lain, bahwa makna kata قَوْمُونَ sangat beragam, antara lain: pelindung, pengayom dan pembimbing. Tampaknya, para mufasir dan fuqaha klasik lebih cenderung mengartikan قَوْمُونَ sebagai pemimpin ketimbang makna-makna lainnya. Bahkan menganggap “ayat ini menunjukkan bahwa lelaki berkewajiban mengatur dan mendidik perempuan, serta menugaskannya berada di rumah dan melarangnya keluar. Perempuan berkewajiban menaati dan melaksanakan perintah laki-laki selama itu bukan perintah maksiat.

Namun sekian banyak mufasir dan pemikir Islam kontemporer memandang

bahwa ayat 34 surat al-Nisa tidak dipahami demikian, apalagi ayat tersebut berbicara dalam konteks kehidupan rumah tangga. Menurut Quraish Shihab, bahwa kata al-rijal dalam ayat *al-rijal qawwamuna 'alan nisa*, bukan berarti laki-laki secara umum, tetapi adalah “suami” karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka.¹² Jika yang dimaksud dengan kata “laki-laki” adalah kaum laki-laki secara umum, tentu konsideransnya tidak demikian. Apalagi lanjutan ayat itu secara tegas berbicara tentang para isteri dan kehidupan rumah tangga.

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah tentang "tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan" sering digunakan sebagai dalil untuk melarang perempuan menjadi pemimpin. Namun, konteks historis hadis ini berkaitan dengan kasus khusus Kerajaan Persia, di mana putri Kisra, Bavaran binti Syirawiyah, memegang kekuasaan absolut yang mengakibatkan kehancuran kerajaan. Hadis ini lebih tepat dipahami dalam konteks sistem monarki dengan kekuasaan terpusat, bukan sistem pemerintahan modern dengan pembagian kekuasaan. Oleh karena itu, jika seorang perempuan memiliki kemampuan untuk memimpin, Islam tidak melarangnya menjabat di posisi kepemimpinan mana pun dalam konteks sistem pemerintahan yang memiliki pembagian kekuasaan yang jelas.

Dengan demikian adalah hadis Abu Bakrah harus digunakan kaidah: *al'ibrāh bi khusus al-sabab la bi 'umum al-lafzi* (yang dilihat adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz). Qurasih Shihab pun memandang hadis ini bersifat khusus. Hadis tersebut ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan terhadap semua masyarakat dan dalam semua urusan.

Dari segi dalil, hadis Abu Bakrah tidak cukup syarat untuk dijadikan pelarangan

keterlibatan perempuan sebagai pemimpin. Karena menurut ushul fiqh, sebuah nash, baru dapat dikatakan menunjukkan larangan jika memuat setidaknya hal-hal berikut: 1. secara redaksional, nash dengan tegas mengatakan haram 2. nash dengan tegas melarangnya dalam bentuk nahi. 3. nash diiringi oleh ancaman 4. menggunakan redaksi lain yang menurut gramatika bahasa Arab menunjukkan tuntutan harus dilaksanakan.¹³

Dengan demikian hadis di atas tidak melarang secara tegas perempuan menjabat tugas kepemimpinan. Tegasnya, bahwa kehancuran kerajaan Persia saat dipimpin oleh putri Kaisar bukan karena dia seorang perempuan namun lebih disebabkan oleh kecakapan atau keahliannya sebagai kepala negara. Sebab keahlian dalam kepemimpinan tidak semata-mata berkaitan dengan kodratnya, sebagai laki-laki atau perempuan. Tetapi lebih dipengaruhi oleh lingkungan dan kesempatan seseorang dalam mengakses informasi ilmu pengetahuan. Tingkat keahlian dalam memimpin justru lebih logis dilihat dari sudut sosiologis, bahkan secara tekstual ada hadis yang mengkaitkan kegagalan suatu urusan yang dipercayakan kepada orang yang tidak ahli (profesional). Sebagaimana nabi saw bersabda:

“Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka waspadalah terhadap datangnya kehancuran.” (HR Bukhari dari Abu Hurairah)

Dalam hadis Abu Bakrah berkaitan dengan ketidakcakapan putri Kaisar sebagai ratu (kepala negara) Persia dalam memimpin negaranya. Hal ini terjadi karena secara kultural di negara Persia, yang dididik untuk menggantikan raja adalah laki-laki sedangkan anak perempuan tidak diberi kesempatan mendapatkan pendidikan yang memadai.¹⁴ Jadi, bukan karena kodratnya sebagai perempuan yang menjadi pemicu negara Persia hancur di masa pemerintahannya. Kalau saja sang putri Kaisar mempunyai

¹² Rahim, A. (2016). Peran kepemimpinan perempuan dalam perspektif gender. AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan, 9(2), 268-295.

¹³ Hamka, H. (2016). Kepemimpinan Perempuan dalam Era Modern. *Al-Qalam*, 19(1), 107-116.

¹⁴ Hazani, D. C. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam di Era Modern. *MASALIQ*, 2(5), 679-693.

keahlian dalam memimpin negara Persia, maka kehancuran itu belum tentu terjadi.

Dalam konteks kepemimpinan putri kaisar Persia itulah pendapat Yusuf Qardawi sangat tepat. Menurut pendapat Yusuf Qardawi, bahwa perempuan dilarang menjadi kepala negara karena potensi perempuan biasanya tidak tahan untuk menghadapi situasi konfrontansi yang mengandung resiko berat. Karena model kepemimpinan kepala negara zaman klasik memang mengurus semua hal termasuk dalam masalah pertahanan negara sedangkan dalam sistem pemerintahan sekarang telah terjadi pembagian kekuasaan. Kepala negara tidak harus terjun langsung dalam masalah-masalah yang memang telah menjadi kewenangan bawahannya.¹⁵

Berdasarkan analisis peneliti, bahwa dalam memimpin suatu urusan itu, maka perempuan boleh menjadi pemimpin. Bukan saja dalam tingkatan yang rendah, tetapi boleh menduduki jabatan publik di posisi puncak. Bukan saja sebagai hakim seperti pendapat Abu Hanifah, tetapi bisa menjadi kepala negara sekalipun. Tegasnya, bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara, asalkan dia profesional dalam memimpin Negara.

Peran Perempuan Dalam Kepemimpinan di Era Modern

Di era modern, perempuan semakin banyak mengambil peran penting dalam kepemimpinan yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Hal ini disebabkan oleh peningkatan akses pendidikan dan kesadaran akan kesetaraan gender.¹⁶

Peningkatan peran dan kedudukan perempuan bertujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan, kualitas sumber daya, derajat kesehatan, dan peran ganda dalam keluarga dan masyarakat. Kemajuan teknologi dan profesionalisasi telah membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam tugas-tugas

kemasyarakatan dan politik. Untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar dalam kepemimpinan, penting untuk mendorong perubahan sosial dan budaya yang mendukung kesetaraan gender serta menghilangkan norma-norma yang membatasi perempuan. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, masyarakat dapat memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mengembangkan potensi kepemimpinan mereka. Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami situasi dan menerapkan kekuasaan yang tepat untuk merespon tuntutan tertentu.

Ada dua perbedaan kehidupan sosial yang nyata bagi laki-laki dan perempuan, lingkungan masyarakat sebagai tempat pertama bagi laki-laki, dan perempuanlah yang akrab dengan lingkungan rumah tangga hubungan diantara keduanya adalah tidak langsung. Penafsiran yang diberikan kepada biologis perempuan menyebabkan kerugian mereka pada semua tingkat masyarakat bukan keadaan biologis mereka sendiri. Perempuan dimanapun umumnya kurang dikenal dan kurang berwenang dalam adat. Penafsiran inilah yang mengikat mereka untuk hanya mengasuh anak-anak dan tetap dalam lingkungan rumah tangga.¹⁷

1. adanya kultur sosial terutama dipedesaan yang memandang laki - laki harus didahulukan dari perempuan.
2. Kaum perempuan dengan perannya sebagai ibu dan pengurus rumah tangga, tidak selalu dapat "siap pakai" dalam mengurus organisasi.
3. adanya sifat alam yang melekat pada seorang perempuan yakni hamil, melahirkan, menyusui, mengurus anak dan menstruasi, yang mematahkan semangat perempuan dalam berpolitik.
4. adanya rasa superior laki-laki sehingga meremehkan kehadiran perempuan di lingkungan partai sehingga perempuan

¹⁵ Hamka, H. (2016). Kepemimpinan Perempuan dalam Era Modern. *Al-Qalam*, 19(1), 107-116.

¹⁶ Cahyaningsih, I. P. (2020). Peran kepemimpinan wanita di era modern. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan*, 5(1), 168-181.

¹⁷ Hartono, R. (2021). Kepemimpinan perempuan di era Globalisasi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 1(1), 82-99.

tidak mendapatkan posisi yang strategis dalam partai.¹⁸

Penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan cenderung menempati posisi terbelakang adalah sebagai berikut : 1)Adanya dikotomi peran publik/ peran domestik yang berakar dari sindroma bahwa “peran perempuan adalah di rumah” pada gilirannya melestarikan pembagian antara fungsi produktif dan fungsi reproduktif antara laki-laki dan perempuan; 2)Adanya konsep “beban kerja ganda” yang melestarikan wawasan bahwa tugas perempuan terutama adalah di rumah sebagai ibu rumah tangga, cenderung mengalami proses aktualisasi potensi perempuan secara utuh; 3)Adanya sindroma subordinasi dan peran marginal perempuan telah melestarikan wawasan bahwa peran dan fungsi perempuan dalam masyarakat adalah bersifat sekunder.

Potensi dasar yang dimiliki oleh perempuan sebagai makhluk religius, individu, sosial dan budaya sebenarnya tidak berbeda dengan laki-laki. Berbagai hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan tentang kemampuan dasar potensial dari kedua jenis (laki-laki dan perempuan) tersebut. Bahkan pada beberapa penelitian, tampak bahwa perempuan memiliki beberapa kelebihan khas, antara lain perempuan lebih mampu untuk berperan ganda, di samping mengembang kodratnya sebagai ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkan anak dengan kasih sayang, perempuan memiliki potensi dasar untuk lebih tahan uji, rela berkorban, tahan menderita, ulet dan sabar dibanding laki-laki.

Pada umumnya perempuan lebih tekun sehingga mereka dapat dipercaya untuk menduduki posisi penting tertentu. Akan tetapi mengapa perempuan secara realitasnya terpinggirkan, termarginalisasi, terpuruk, tidak berdaya dan bahkan tereksplorasi diberbagai sektor kehidupan, khususnya dalam politik, dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan

kebijakan publik. Bila dianalisis maka ternyata bahwa keadaan itu disebabkan oleh dua faktor yaitu:

1. Faktor Internal yaitu perempuan bersumber dari Kepemimpinan Perempuan dalam Era Modern kualitas perempuan itu sendiri. Sekalipun kuantitas perempuan besar jumlahnya, banyak perempuan yang berpotensi kurang memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri melalui peningkatan wawasan pengetahuan, kemampuan pengendalian diri, berkomunikasi dan beraktualisasi sesuai dengan hati nurani kata hati yang suci dan luhur, sehingga perempuan berprestasi optimal dalam posisi apapun baik sebagai ibu, isteri, tokoh masyarakat dan professional.
2. Faktor Eksternal yaitu bersumber dari luar diri perempuan. Berbentuk antara lain dominasi laki-laki untuk tetap menjadi leader yang berimbas pada berbagai produk sosial budaya yang berpandangan merugikan dan tidak equal bagi perempuan. Lebih jauh lagi muncul penafsiran ajaran agama yang bertentangan dengan asas keadilan dan kesetaraan penciptaan manusia oleh sang Khaliq. Realitas tersebut telah memposisikan keterpurukan perempuan dalam kebodohan dan tidak keberdayaan serta kurang memberi peluang pada perempuan secara lebih berkeadilan.¹⁹

Dalam kehidupan jaman modern saat ini wanita tidak lagi dilihat sebelah mata. Wanita jaman sekarang sudah memiliki kekuatan untuk berdiri sejajar dengan pria. Banyak wanita pekerja keras, yang bahkan ada yang bekerja untuk membantu menambah penghasilan orangtuanya ketika mereka sudah dewasa, atau bahkan membantu suaminya mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Peran wanita dalam segala aspek memiliki peran yang sangat penting. Wanita dewasa ini mampu

¹⁸ Hartono, R. (2021). Kepemimpinan perempuan di era Globalisasi. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK), 1(1), 82-99.

¹⁹ Hartono, R. (2021). Kepemimpinan perempuan di era Globalisasi. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK), 1(1), 82-99.

menempatkan dirinya dalam lingkungan yang berbeda-beda. Berbeda dalam hal ini adalah, ketika wanita menjadi seorang istri dari suami yang dicintainya, kedudukannya sebagai istri tentunya menurut kepada suami, membantu melayani suami dalam segala permasalahan rumah tangga. Wanita mampu mendampingi suami dalam situasi apapun.²⁰

Pada dasarnya, perempuan memiliki sifat-sifat dasar untuk sukses sebagai pemimpin. Mereka cenderung lebih sabar, memiliki empati, fleksibel, berani untuk mengambil resiko dan multitasking. Perempuan juga memiliki bakat untuk menjalin networking dan melakukan negosiasi. Peran perempuan kini secara tidak langsung sudah memiliki ekstra posisi yang tidak dapat digantikan oleh kaum laki-laki. Dengan memberi kesempatan kemudian menyemangati perempuan untuk berperan sebagai pemimpin, pemerintah dan organisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa peran dan fungsi perempuan adalah sebagai berikut:

1. Peran Kodrati (Peran Reproduksi)

Secara historis cultural, peran perempuan yang dikaitkan dengan kerumah tanggaa didasarkan pada kodrat perempuan yang mengarah pada aspek biologis. Kalau merujuk pada akar budaya dan agama, maka peran kodrati tidak hanya terbatas pada peran reproduktif (hamil, melahirkan dan menyusukan atau peran yang tidak bernilai uang), tetapi juga terjadi pada pembagian kerja domestik dan publik antar suami-isteri. Peran reproduktif dikatakan esensi dari peran kodrati karena ia tidak dapat digantikan oleh jenis jender lainnya, akan tetapi dalam proses melahirkan keturunan itu perlu dilibatkan jenis jender laki-laki. Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam melahirkan keturunan itu sangat diperlukan keabsahannya dalam Islam melalui perkawinan. Peran dan

fungsi perempuan dapat dibagi menjadi empat kategori utama: peran kodrati (reproduksi), peran ekonomi (produktif), peran sosial (kemasyarakatan), dan peran politik. Peran kodrati meliputi reproduksi dan pengelolaan rumah tangga, termasuk sosialisasi nilai-nilai keluarga dan pendidikan anak. Peran ekonomi mencakup kontribusi perempuan dalam kegiatan produktif, baik di dalam maupun di luar rumah. Peran sosial melibatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan kemasyarakatan dan pengembangan potensi diri. Peran politik mengacu pada keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan. Semua peran ini saling terkait dan mencerminkan kompleksitas fungsi perempuan dalam masyarakat modern, di mana mereka dituntut untuk menyeimbangkan berbagai tanggung jawab dan ekspektasi sosial.

Klasifikasi peran mencakup tiga hal, yaitu: 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan; 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dari beberapa definisi mengenai pengertian peranan tersebut, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut : (1) Peranan atau role adalah pengaruh yang diharapkan dari sesuatu hal atau seseorang dalam dan antara hubungan sosial tertentu; (2) Peranan adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu; (3) Peranan berlangsung bilamana

²⁰ Hartono, R. (2021). Kepemimpinan perempuan di era Globalisasi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 1(1), 82-99.

seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya; (4) Peranan terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Membahas tentang peran (role) tidak dapat dipisahkan dengan uraian tentang kedudukan (status), karena peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan dan tidak ada peranan tanpa kedudukan, dan sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peranan. Dengan demikian, kedudukan seseorang dalam suatu sistem sosial merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat seseorang dalam sistem itu, sedangkan peranan menunjuk pada fungsi dan penyesuaian diri dalam suatu proses, kedudukan dalam suatu sistem sosial, dapat diperoleh melalui empat cara, yaitu:

- 1) Kedudukan diperoleh karena kelahiran (ascribed status), misalnya seseorang memperoleh kedudukan sebagai bangsawan karena ayahnya bangsawan;
- 2) Kedudukan diperoleh karena memiliki kemampuan dan kelebihan khusus (achieved status), misalnya seseorang memperoleh kedudukan sebagai pemimpin karena memiliki kemampuan dan seni memimpin;
- 3) Kedudukan yang diperoleh karena pemberian yang bersifat pribadi (assigned status), misalnya seseorang kepala kantor memberikan kedudukan kepada salah seorang bawahannya sebagai kepala bagian karena pernah berutang budi kepada ayahnya;
- 4) Kedudukan yang diperoleh secara alamiah (natural status), misalnya kedudukan sebagai ayah, ibu, kakak, adik, nenek dan lain-lain.

Bernay, mengatakan bahwa peran perempuan dalam partai politik

tidak lain di mana wanita yang bermimpi untuk terjun ke dalam kancha politik hendaknya jangan puas diri hanya dengan mengerjakan tugas administrative, sebaiknya mereka harus berupaya keras untuk mendaki tangga hirarki partai menuju posisi manajerial yang lebih memberi tanggungjawab yang tidak hanya menambah wawasan tetapi juga meningkatkan pengetahuan mereka dalam partai dan komunikasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang selama ini banyak menjadi tekanan bahkan diberlakukan secara diskriminatif ketidakadilan yang terjadi dalam sebuah partai politik diharapkan mampu menanggapi yang sifatnya rasionalisasi, sehingga tidak terjadi konflik internal partai, akan tetapi bertanggung jawab dalam menjalankan sebuah roda organisasi yang baik.²¹

Berdasarkan analisis peneliti, meskipun perempuan telah lama menghadapi tekanan dan diskriminasi, mereka telah menunjukkan kemampuan untuk merespon dengan efektif dan rasional. Era modern memberikan lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinan mereka meskipun harus menghadapi tantangan. Dan dukungan dari masyarakat sangat penting untuk memfasilitasi peran perempuan dalam kepemimpinan.

Tantangan Kepemimpinan Di Era Modern

Dalam menghadapi era modern yang terus menerus berkembang, perubahan dan tantangan kepemimpinan perempuan menjadi semakin kompleks dan menuntut adaptasi yang cepat. Transformasi teknologi yang pesat tidak hanya mempengaruhi cara bisnis dan organisasi beroperasi, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada peran dan persepsi kepemimpinan perempuan.

²¹ Abdul Rahim, "Peran Kepemimpinan Perempuan - Gender," *Al-Maiyyah* 9, No. 2 (2016): 268–295.

Menekplorasi perubahan-perubahan tersebut, bersama dengan tantangan-tantangan yang muncul dalam mengemban peran kepemimpinan di era sekarang. Perubahan paradigma terkait kepemimpinan menjadi semakin jelas. Kepemimpinan tidak lagi hanya diukur oleh kemampuan tradisional untuk mengambil keputusan dan memberikan arahan, tetapi juga melibatkan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi dan memahami perubahan dinamika digital. Pemimpin perempuan harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini, menguasai keterampilan digital, dan memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi.

Dalam era ini, perubahan terjadi pada cara kita bekerja dan berkolaborasi. Keterlibatan perempuan dalam dunia teknologi memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan alat-alat dan platform yang merubah cara kita berkomunikasi dan bekerja. Namun perempuan juga harus menghadapi tantangan yang terkait dengan kepemimpinan. Tantangan tersebut diantaranya:²²

Budaya Patriarki: Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang menghambat partisipasi perempuan dalam memimpin. Norma-norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga dan membatasi ruang gerak mereka di ranah publik membuat banyak perempuan enggan untuk terlibat.

Dalam budaya patriarki, terdapat beberapa karakteristik yang umumnya terjadi:

1. **Dominasi Laki-laki:** Laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga dan memiliki otoritas yang lebih tinggi dalam membuat keputusan, baik di ranah domestik maupun publik. Kekuasaan laki-laki sering kali dianggap sebagai norma yang tidak boleh dipertanyakan.

2. **Pembagian Peran Gender yang Tradisional:** Budaya patriarki cenderung membagi peran gender secara tradisional, di mana perempuan diharapkan untuk mengambil peran sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh anak, sementara laki-laki diharapkan untuk menjadi pencari nafkah dan pemimpin keluarga.
3. **Diskriminasi dan Ketidaksetaraan:** Perempuan sering kali mengalami diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, akses terhadap sumber daya, dan partisipasi politik. Mereka mungkin mendapat perlakuan yang kurang adil dan memiliki akses terbatas terhadap kesempatan dan sumber daya yang sama dengan laki-laki.
4. **Kontrol atas Tubuh dan Seksualitas:** Budaya patriarki sering kali mengatur kontrol atas tubuh dan seksualitas perempuan. Perempuan dapat mengalami penindasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, serta pembatasan terhadap hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi mereka.

Stereotip Gender: Budaya patriarki cenderung memperkuat stereotip gender yang membatasi perkembangan individu dan masyarakat. Peran-peran yang ditetapkan berdasarkan jenis kelamin dapat menyebabkan pembatasan terhadap aspirasi dan potensi individu, baik perempuan maupun laki-laki.

Budaya patriarki dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam memerangi budaya patriarki dan memperjuangkan kesetaraan gender, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.²³

²² . Abdussamad, J., Dunggio, S., & Ip, S. (2024). Kepemimpinan Perempuan di Era Digitalisasi. Takaza Innovatix Labs.

²³ Kahpi, M. L., & Harahap, A. (2024). Analisis Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia: Faktor Penghambat Dan Pendorong. Jurnal Kajian Gender dan Anak, 8(1), 64-77.

Selain tantangan di atas terdapat pula tantangan lain bagi kepemimpinan wanita, yaitu interpretasi pro dan kontra tentang hak kepemimpinan bagi wanita. Ibnu Hajar alAsqalani menandakan bahwa pemimpin wanita bukanlah mani' (penghalang) dalam hukum Islam. Pendapat ini kemudian dikuatkan oleh sebagian ulama Malikiyyah dalam memberikan legitimasi Ratu Syajaratu al-Dur di Mesir.²⁴

Selain itu, eksistensi perempuan diranah public juga menghadapi tantangan, antara lain:

1. Sindrom *Cinderella Complex*: adalah sindrom yang dikemukakan oleh Collete Dowling yaitu suatu rasa takut yang begitu mencekam, sehingga wanita merasa tidak berani dan tidak bisa memanfaatkan potensi otak dan daya kreatifitasnya secara penuh. wanita merasa takut menjadi terkenal, sukses, dan menempati posisi penting, karena merasa harus berperan di sektor domestik, dengan alasan agama, budaya, dsb. Banyak wanita mengalami sindrom ini, dan mengambil keputusan untuk bekerja dan berkarir seadanya, padahal ia memiliki potensi yang amat besar.
2. Dukungan institusi yang belum maksimal: maksud dukungan institusi disini adalah institusi keluarga, masyarakat, perusahaan, dan pemerintahan. Meskipun pola pikir masyarakat sudah berkembang tetapi masih di temui pola pikir belum maju, dan berakibat pada dukungan institusi yang belum maksimal. Misalnya: institusi keluarga, dimana ayah, ibu, suami, mertua, dsb memiliki pola pikir yang menghambat wanita aktif di sektor publik. Atau perusahaan yang beranggapan bahwa wanita hanya boleh menempati posisi tertentu saja.
3. Pergeseran nilai dalam kehidupan: era globalisasi memberi pengaruh bergesernya nilai yang dianut oleh masyarakat. Nilai sukses diukur dari

sisi materi seperti: uang, rumah jabatan, kepopuleran. Situasi ini membuat wanita banyak mengejar simbol-simbol tersebut. wanita terjebak untuk bekerja terus menerus dan sangat keras (menjadi sangat maskulin). Cenderung meninggalkan femininitasnya. Dengan demikian, pelan dan pasti wanita digiring mencapai ambisi, menjadi semakin individual, cenderung mengabaikan nilai kebersamaan.

Peluang Perempuan Dalam Kepemimpinan

Untuk menopang pengembangan pemimpin perempuan, peneliti menyarankan adanya tindakan berikut:

1. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah atau organisasi yang mendukung partisipasi perempuan dalam kepemimpinan.
2. Melakukan pelatihan khusus untuk kepemimpinan perempuan karena penting untuk mempersiapkan perempuan dalam mengambil peran kepemimpinan.

Adapun upaya yang bisa dilakukan yaitu:

1. Dari segi intern yaitu menuntut ilmu setinggi-tingginya.
2. Segi ekstern yaitu peran masyarakat:
 - a. Masyarakat dapat membantu menempatkan perempuan di dalam ranah politik.
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan yayasan-yayasan yang melibatkan perempuan.
 - c. Pemerintah membuat aturan nomor 9 tahun 2000 tentang gender.²⁵

Untuk menghadapi tantangan peran perempuan di era modern, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, mewujudkan konsep "equality in diversity" yang

²⁴ Cahayaningsih, I. P. (2020). Peran kepemimpinan wanita di era modern. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan*, 5(1), 168-181.

²⁵ Safitri, O., Firmansyah, A., Putra, R. S., Zhulqarnain, M. R. I., & Ciputri, O. (2021). Kepemimpinan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender. *Prosiding SNP2M UMAHA*, 1(1), 183-186.

memungkinkan perempuan mempertahankan kualitas femininnya sambil berkiprah di dunia publik. Kedua, menentukan skala prioritas dalam berbagai tahap kehidupan, seperti mengeksplorasi potensi diri saat masih lajang dan menyeimbangkan peran keluarga dengan pengembangan diri saat sudah berkeluarga. Ketiga, membentengi diri dengan nilai-nilai mulia yang berakar pada agama dan tradisi, sehingga dapat menjaga identitas dan integritas di tengah arus globalisasi. Solusi-solusi ini bertujuan untuk membantu perempuan menyeimbangkan berbagai peran dan tanggung jawab mereka sambil tetap mempertahankan nilai-nilai penting dalam kehidupan.

Kesimpulan

Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kepemimpinan, selama mereka sanggup dan profesional dalam memimpin. Di era modern, peran perempuan dalam kepemimpinan semakin diakui dan diperluas, memungkinkan mereka untuk berkontribusi pada inovasi dan pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Meskipun demikian, perempuan masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan gender, diskriminasi, dan kurangnya dukungan institusional.

Namun, era modern juga membuka peluang bagi perempuan melalui peningkatan akses pendidikan, kesadaran akan kesetaraan gender, dan teknologi yang mendukung kerja fleksibel. Meskipun tantangan masih ada, peluang untuk keberhasilan perempuan dalam kepemimpinan di era modern sangat besar. Oleh karena itu, penting bagi institusi dan masyarakat untuk mendukung dan memberdayakan perempuan agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal di berbagai bidang.

Referensi

Abdussamad, J., Dunggio, S., & Ip, S. (2024). *Kepemimpinan Perempuan di Era Digitalisasi*. Takaza Innovatix Labs.

- Abdul Rahim, "Peran Kepemimpinan Perempuan - Gender," *Al-Maiyyah* 9, No. 2 (2016): 268–295.
- Amanda, K. S., Rahardjo, T., & Ayun, P. Q. (2024). Isu Seksisme Dan Relasi Gender Dalam Kepemimpinan Perempuan di Organisasi Mahasiswa Universitas Diponegoro. *Interaksi Online*, 12(3), 422-434.
- Cahayaningsih, I. P. (2020). Peran kepemimpinan wanita di era modern. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan*, 5(1), 168-181.
- Fitriani, A. (2015). Gaya kepemimpinan perempuan. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(2), 1-22.
- Hamka, H. (2016). *Kepemimpinan Perempuan dalam Era Modern*. Al-Qalam, 19(1), 107-116.
- Hartono, R. (2021). *Kepemimpinan perempuan di era Globalisasi*. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 1(1), 82-99.
- Hazani, D. C. (2022). *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam di Era Modern*. *MASALIQ*, 2(5), 679-693.
- Hidir, A., & Malik, R. (2024). *Teori Sosiologi Modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Kahpi, M. L., & Harahap, A. (2024). Analisis Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia: Faktor Penghambat Dan Pendorong. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 8(1), 64-77.
- Malihah, L., Zabidi, H., Atkia, N., Apifah, N. N., & Haryanti, P. (2024). *Kepemimpinan Perempuan dan Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), 1094-1103.
- Puspitawati, H. (2013). *Konsep, teori dan analisis gender*. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen

Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian.

- Rahim, A. (2016). Peran kepemimpinan perempuan dalam perspektif gender. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 9(2), 268-295.
- Rakia, A. S. R., & Hidayat, W. A. (2022). Aspek Feminist Legal Theory dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Amsir Law Journal*, 4(1), 69-88.
- Safitri, O., Firmansyah, A., Putra, R. S., Zhulqarnain, M. R. I., & Ciputri, O. (2021). Kepemimpinan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender. *Prosiding SNP2M UMAHA*, 1(1), 183-186.